SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG KESTABILAN JARINGAN LISTRIK DI DESA PULAU MANAK KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh:

Oktario Fersanedo

NIM. E1032221038

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG KESTABILAN JARINGAN LISTRIK DI DESA PULAU MANAK KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

Untuk Memenuh Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh:

Oktario Fersanedo

NIM. E1032221038

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG KESTABILAN JARINGAN LISTRIK DI DESA PULAU MANAK KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Oktario Fersanedo

NIM. E1032221038

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Erdi, M.Si Tanggal: 6-05-2026

NIP. 196707272005011001

Dosen Pembimbing Pendamping

Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si Tanggal: 21-05-2026

NIP. 198306272006042020

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG KESTABILAN JARINGAN LISTRIK DI DESA PULAU MANAK, KECAMATAN EMBALOH HULU, KABUPATEN KAPUAS HULU

Oleh :

Oktario Fersanedo

NIM. E1032221038

Dipertahankan di : Pontianak

Pada Hari/ Tanggal : 15 Juli 2026

Waktu : 13.00 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Sisang FISIP UNTAN

Tim Penguji

Ketua

Dr. Erdi, M.Si

NIP. 196707272005011001

Sekretaris

Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si

NIP. 198306272006042020

Penguji Utama

Dr.Isdairi, M.Si

NIP. 196402181990021001

Penguji Pendamping

Silverius Tey Seran,S.STP,M.A.P.

NIP. 199110022012061003

Disahkan Oleh :

Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan,S.Sos,M.Si

NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Pulau Manak dalam mendorong kestabilan jaringan listrik di Desa Pulau Manak, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih terjadinya gangguan layanan listrik yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, keterlambatan pelaporan gangguan, dan terbatasnya pembinaan kepada masyarakat, sementara pemerintah desa tidak memiliki kewenangan teknis dalam pemeliharaan jaringan listrik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa, serta masyarakat. Analisis penelitian menggunakan teori fungsi pemerintahan menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo (2017) yang meliputi fungsi fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi fasilitasi telah dilaksanakan melalui penerimaan dan penyampaian laporan gangguan listrik kepada pihak PLN, namun belum didukung oleh mekanisme pencatatan dan pengelolaan laporan yang sistematis. Fungsi koordinasi diwujudkan melalui komunikasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait, serta upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar jaringan listrik, meskipun pelaksanaannya masih bersifat situasional. Sementara itu, fungsi pembinaan masih terbatas pada penyampaian imbauan secara informal dan belum dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang terprogram. Secara keseluruhan, Pemerintah Desa Pulau Manak telah menjalankan fungsi fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan dalam mendukung kestabilan jaringan listrik, namun pelaksanaannya belum optimal sehingga masih diperlukan penguatan pada aspek pembinaan masyarakat dan koordinasi partisipatif.

Kata kunci: peran pemerintah desa, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, kestabilan jaringan listrik.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Desa Pulau Manak Government in promoting the stability of the power grid in Desa Pulau Manak, Embaloh Hulu Subdistrict, Kapuas Hulu Regency. The study was motivated by the ongoing occurrence of electricity service disruptions caused by environmental factors, delays in reporting outages, and limited community outreach. At the same time, the village government lacks technical authority over electricity grid maintenance. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving the Village Head, Village Secretary, village officials, and community members. The analysis is based on the theory of government functions proposed by Ryaas Rasyid as cited in Muhadam Labolo (2017), which includes the functions of facilitation, coordination, and community guidance. The results indicate that the facilitation function has been carried out through the receipt and submission of reports on power outages to PLN; however, this has not been supported by a systematic mechanism for recording and managing these reports. The coordination function is realized through communication between the village government, the community, and relevant parties, as well as efforts to encourage community participation in maintaining the environment surrounding the power grid, although its implementation remains situational. Meanwhile, the guidance function remains limited to informal appeals and has not yet been carried out through structured outreach activities. Overall, the Desa Pulau Manak Government has carried out the functions of facilitation, coordination, and guidance in supporting the stability of the power grid; however, implementation has not been optimal, so further strengthening is needed in the areas of community guidance and participatory coordination.

Keywords: role of the village government, facilitation, coordination, guidance, stability of the power grid.

RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini mengkaji peran Pemerintah Desa Pulau Manak dalam mendorong kestabilan jaringan listrik di Desa Pulau Manak, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya gangguan layanan listrik yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti keberadaan pepohonan di sekitar jaringan listrik, keterlambatan penyampaian laporan gangguan, serta masih terbatasnya pembinaan kepada masyarakat mengenai penggunaan listrik yang aman. Meskipun pemeliharaan teknis jaringan listrik merupakan kewenangan PT PLN (Persero), kondisi tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah desa dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah Desa Pulau Manak dalam mendorong kestabilan jaringan listrik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah desa melalui fungsi fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan dalam mendukung kestabilan jaringan listrik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa, serta masyarakat. Analisis penelitian menggunakan teori fungsi pemerintahan menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo (2017) yang meliputi fungsi fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Pulau Manak telah dilaksanakan melalui fungsi fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan, namun belum sepenuhnya optimal. Pada fungsi fasilitasi, pemerintah desa telah menerima

dan meneruskan laporan gangguan listrik dari masyarakat kepada pihak PLN, meskipun sebagian masyarakat masih memilih melapor secara langsung. Pada fungsi koordinasi, pemerintah desa berperan menghubungkan komunikasi antara masyarakat dan pihak terkait serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan di sekitar jaringan listrik. Sementara itu, fungsi pembinaan masih bersifat insidental dan belum dilaksanakan secara terprogram melalui kegiatan sosialisasi atau edukasi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, peran pemerintah desa dalam mendukung kestabilan jaringan listrik bersifat nonteknis melalui fungsi fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan, sehingga masih diperlukan penguatan, terutama pada aspek pembinaan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlangsungan layanan listrik.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Oktario Fersanedo
Nomor Induk Mahasiswa	: E1032221038
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat milik orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 15 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Oktario Fersanedo

Nim. E1032221038

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku."

— Filipi 4:13

PERSEMBAHAN

Skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Mendorong Kestabilan Jaringan Listrik Di Desa Pulau Manak, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu” ini, Peneliti persembahkan dengan penuh syukur dan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, sumber hikmat dan kekuatan, yang menuntun setiap langkah penelitian ini dan memberi berkat agar dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada kedua orang tua tercinta, yang dengan doa, kasih, dan pengorbanan mereka telah menjadi teladan kesabaran, ketekunan, dan integritas dalam hidup.
3. Kepada dosen pembimbing dan civitas akademika, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan inspirasi sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
4. Kepada masyarakat Desa Pulau Manak, yang telah bersedia memberikan informasi, kerja sama, dan dukungan sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

5. Sebagai refleksi pribadi, agar penelitian ini menjadi sarana pembelajaran dan pertumbuhan, serta pengingat bahwa ketekunan, kesabaran, dan iman akan selalu menjadi fondasi dalam menuntut ilmu dan melayani masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan campur tangannya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Desa Dalam Mendorong Kestabilan Jaringan Listrik Di Desa Pulau Manak, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu" dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak. Peneliti juga sadar akan kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, karena hasil yang dicapai melalui skripsi ini merupakan langkah awal dari ilmu pengetahuan yang peneliti dapatkan.

Keberhasilan dalam pembuatan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H,.M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Bapak Dr. Herlan,S.Sos,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura;
3. Bapak Bima Sujendra. S.IP, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura;
4. Bapak Dr.Erdi,M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dan senantiasa mengarahkan penulis dengan kesungguhan hati hingga skripsi ini selesai;
5. Ibu Rulida Yuniarsih,S.IP,M.Si selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dr.Isdairi selaku Dosen Penguji utama yang telah memberikan arahan dan masukan sebagai dasar perbaikan;

7. Bapak Silverius Tey Seran,S.STP, M.A.P selaku Dosen Penguji pendamping yang juga telah memberikan arahan dan masukan sebagai dasar perbaikan;
8. Ibu Aliyah Nur'aini Hanum, S.Sos.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang juga telah memberikan arahan;
9. Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak membantu selama perkuliahan;
10. Kepada Pemerintah Desa Pulau Manak, masyarakat Desa Pulau Manak, yang telah bersedia memberikan informasi, kerja sama, dan dukungan sehingga penelitian dan Skripsi ini dapat selesai.
11. Orang tua dan keluarga atas doa serta dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu oleh peneliti yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan yang sebaik-baiknya, dan hasil karya yang peneliti lakukan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang berarti bagi kita semua yang memerlukan.

Pontianak, 15 Juli 2026

Oktario Fersanedo

E1032221038

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
RINGKASAN SKRIPSI vii
PERNYATAAN KEASLIAN ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN x
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR GAMBAR xviii
DAFTAR LAMPIRAN xix
DAFTAR ISI xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 12
1.3 Fokus Penelitian 13
1.4 Rumusan Masalah 14
1.5 Tujuan Penelitian 14
1.6 Manfaat Penelitian 14
1.6.1 Manfaat Teoritis 14
1.6.2 Manfaat Praktis 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 17
2.1 Definisi Konsep 17
2.1.1 Konsep Peran Pemerintah Desa 17
2.1.2 Konsep Pelayanan Publik …..... 18
2.1.3 Konsep Kestabilan Layanan Kelistrikan 20
2.1.4 Konsep Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan 20
2.2 Teori 22
2.2.1 Fungsi Pemerintahan Menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam 22
2.3 Hasil Penelitian Relevan 28

2.4 Alur Pikir Penelitian 32
2.5 Pertanyaan Penelitian..... 35
BAB III METODE PENELITIAN 36
3.1 Jenis Penelitian 36
3.2 Langkah-langkah Penelitian 37
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 39
3.3.1 Lokasi Penelitian 39
3.3.2 Waktu Penelitian 40
3.4 Subjek dan Objek Penelitian..... 41
3.4.1 Subjek Penelitian…..... 41
3.4.2 Objek Penelitian 42
3.5 Teknik Pengumpulan Data 43
3.6 Instrument Atau Alat Pengumpulan Data 44
3.7 Analisis Data..... 46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN..... 51
4.1 Sejarah Singkat Desa Pulau Manak 51
4.1.1 Kondisi Geografis Desa 52
4.1.2 Jumlah Penduduk 53
4.1.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama 54
4.1.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat …..... 55
4.1.5 Mata Pencaharian Masyarakat 56
4.1.6 Sarana dan Prasarana Desa 57
4.2 Visi dan Misi Desa Pulau Manak 58
4.2.1 Visi Desa Pulau Manak 58
4.2.2 Misi Desa Pulau Manak 59
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 60
5.1 Peran Pemerintah Desa Dalam Mendorong Kestabilan Jaringan Listrik .. 60
5.1.1 Peran Fasilitasi Pemerintah Desa 61
5.1.2 Peran Koordinasi Pemerintah Desa …..... 68
5.1.3 Peran Pembinaan Pemerintah Desa …..... 74
BAB VI PENUTUP..... 82
6.1 Kesimpulan..... 82
6.2 Saran 83
6.3 Keterbatasan Penelitian 84

DAFTAR PUSTAKA 87
LAMPIRAN 90

DAFTAR TABEL

Tabel *Halaman*

2.3 Hasil Penelitian Relevan 30
3.3 Waktu Penelitian 40
4.1 Pembagian Wilayah Dusun Desa Pulau Manak 52
4.2 Jumlah Penduduk Desa Pulau Manak 53
4.3 Penduduk Berdasarkan Agama 54
4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pulau Manak 55
4.5 Mata Pencaharian Desa Pulau Manak 56
4.6 Sarana dan Prasarana Desa 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar *Halaman*

2.4 Bagan Alur Pikir Penelitian 34

5.1 Laporan Masyarakat Terkait Gangguan Listrik 63

5.2 Pembersihan Pohon Tumbang Yang Mengganggu Jaringan Listrik 70

5.3 Titik Jaringan Listrik Yang Dekat Dengan Pohon 79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *Halaman*

1. Pedoman Wawancara 90
2. Dokumentasi Penelitian 93
3. Biodata Peneliti 95
4. Surat Tugas Penelitian 96

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Desa Pulau Manak merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Desa ini terdiri atas tiga dusun dengan jumlah penduduk sekitar 220 kepala keluarga (KK). Sebagai wilayah yang berada di kawasan perdesaan, masyarakat Desa Pulau Manak memiliki karakteristik sosial yang masih dipengaruhi oleh nilai kebersamaan, hubungan kekeluargaan, serta praktik gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, kondisi sosial tersebut menjadi bagian penting yang memengaruhi pelaksanaan pelayanan publik serta hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Beberapa tahun terakhir, perkembangan infrastruktur dasar di wilayah perdesaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Salah satu bentuk peningkatan tersebut adalah tersedianya layanan listrik yang kini telah menjangkau wilayah Desa Pulau Manak selama 24 jam. Kehadiran listrik tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi bagi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan sosial, dan komunikasi masyarakat. Dengan tersedianya layanan listrik yang memadai, masyarakat desa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas serta memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan publik yang semakin berkembang.

Desa Pulau Manak memperoleh pasokan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui jaringan distribusi yang terhubung dengan pusat suplai listrik di Kabupaten Kapuas Hulu. Jarak jaringan distribusi menuju desa diperkirakan mencapai ±97 kilometer. Panjangnya jaringan distribusi tersebut menunjukkan bahwa sistem kelistrikan yang melayani Desa Pulau Manak tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi jaringan di wilayah desa, tetapi juga bergantung pada kondisi jaringan listrik di wilayah lain yang berada dalam jalur distribusi yang sama. Oleh karena itu, setiap gangguan yang terjadi pada jaringan distribusi berpotensi memengaruhi kontinuitas pelayanan listrik bagi masyarakat Desa Pulau Manak.

Berdasarkan data Pemerintah Desa Pulau Manak Tahun 2024, jumlah pelanggan listrik yang tercatat secara administratif sebanyak 142 pelanggan, sedangkan jumlah kepala keluarga mencapai sekitar 220 KK. Perbedaan tersebut disebabkan oleh kondisi di mana dalam satu rumah tinggal terdapat dua hingga tiga kepala keluarga yang menggunakan satu sambungan listrik secara bersama. Fenomena ini umum dijumpai di wilayah perdesaan. Meskipun demikian, secara faktual sebagian besar masyarakat Desa Pulau Manak telah memperoleh akses terhadap layanan listrik sehingga keberadaan listrik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas rumah tangga, kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan data awal Pemerintah Desa Pulau Manak Tahun 2024, sepanjang Januari hingga Desember 2024 terdapat lebih dari 28 laporan gangguan jaringan listrik yang diterima oleh pemerintah desa, meskipun

jumlah pastinya tidak dapat dipastikan karena belum dilakukan pencatatan administrasi secara sistematis. Dari laporan tersebut, hanya 18 laporan atau sekitar 64% yang berhasil diteruskan dan ditindaklanjuti oleh PLN Putussibau, sedangkan sisanya mengalami keterlambatan dalam proses penyampaian informasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa selain masih terjadi gangguan jaringan listrik, mekanisme komunikasi dan fasilitasi pelaporan antara masyarakat dengan pemerintah desa juga belum berjalan secara optimal. Selain itu, berdasarkan data perangkat Desa Pulau Manak Tahun 2024, hingga akhir tahun belum terdapat kegiatan rutin berupa penyuluhan keselamatan penggunaan listrik maupun ajakan pemeliharaan lingkungan di sekitar jaringan listrik. Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu (2024) juga melaporkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan pemeliharaan lingkungan jaringan listrik masih relatif rendah, yaitu sekitar 45% dari jumlah kepala keluarga yang ada.

Sebagai bagian dari pelayanan publik, keberadaan listrik memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat perdesaan. Listrik mendukung berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan belajar pada malam hari, kegiatan ekonomi rumah tangga, pelayanan administrasi pemerintahan desa, hingga kegiatan sosial dan keagamaan. Namun demikian, dalam praktiknya kestabilan jaringan listrik di Desa Pulau Manak masih mengalami gangguan pada waktu-waktu tertentu. Gangguan tersebut tidak terjadi secara rutin, melainkan bersifat insidental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti

kondisi cuaca, pohon yang berada di sekitar jaringan listrik, maupun gangguan pada jaringan distribusi di wilayah lain yang berada dalam satu jalur distribusi.

Kondisi tersebut juga sejalan dengan fenomena yang terjadi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu secara umum. Menurut Diskominfo Kabupaten Kapuas Hulu (2024), gangguan jaringan listrik tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh belum optimalnya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menjaga lingkungan di sekitar jaringan listrik. Antara News Kalimantan Barat (2024) juga melaporkan bahwa sebagian desa di Kabupaten Kapuas Hulu masih mengalami ketidakstabilan jaringan listrik akibat keterbatasan dukungan kelembagaan di tingkat lokal. Dampak gangguan listrik di wilayah pedalaman tidak hanya dirasakan pada aspek teknis penyediaan tenaga listrik, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Suara Kalbar (2022) mencatat terjadinya kebakaran rumah di Desa Dangkan akibat penggunaan lilin selama pemadaman listrik, sedangkan Tribun Pontianak (2017) melaporkan pemadaman listrik hingga 12 hari di Kecamatan Silat Hilir yang menghambat kegiatan pendidikan, pelayanan masyarakat, dan aktivitas keagamaan. Berbagai fakta tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap listrik semakin tinggi sehingga setiap gangguan yang terjadi tidak hanya menjadi persoalan teknis kelistrikan, tetapi juga berimplikasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di tingkat desa.

Gangguan tersebut tidak bersifat rutin atau terjadi setiap hari, melainkan bersifat insidental dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Gangguan yang terjadi

dapat berupa fluktuasi tegangan listrik, pemadaman sementara, maupun gangguan distribusi yang disebabkan oleh kondisi jaringan listrik di wilayah lain yang berada dalam satu jalur distribusi. Selain itu, faktor lingkungan di sekitar jaringan juga dapat menjadi salah satu penyebab gangguan listrik. Dalam kondisi tertentu, pohon yang berada di sekitar jaringan listrik berpotensi mengganggu aliran listrik apabila dahan atau rantingnya menyentuh kabel jaringan, terutama ketika terjadi angin kencang atau cuaca buruk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kestabilan jaringan listrik tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis penyediaan tenaga listrik, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak dalam menjaga kondisi lingkungan dan kelancaran komunikasi ketika terjadi gangguan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki posisi strategis dalam memberikan pelayanan publik dan menjembatani berbagai kebutuhan masyarakat. Syafiie (2011) menjelaskan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pembangunan di tingkat desa. Kedekatan tersebut menjadikan pemerintah desa memiliki peran penting dalam membangun komunikasi, mendorong partisipasi masyarakat, serta menghubungkan masyarakat dengan instansi yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya. Oleh karena itu, meskipun tidak memiliki kewenangan teknis di bidang ketenagalistrikan, pemerintah desa tetap memiliki

tanggung jawab dalam aspek pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan layanan ketenagalistrikan di Indonesia merupakan kewenangan badan usaha penyedia tenaga listrik yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan, PLN bertanggung jawab atas pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, dan pengamanan jaringan listrik hingga kepada pelanggan. Dengan demikian, pemerintah desa tidak memiliki kewenangan teknis dalam melakukan perbaikan jaringan listrik, penggantian tiang, kabel, maupun instalasi distribusi listrik. Oleh karena itu, setiap gangguan teknis yang terjadi pada jaringan listrik tetap menjadi tanggung jawab PLN sebagai penyelenggara layanan ketenagalistrikan.

Meskipun tidak memiliki kewenangan teknis, pemerintah desa tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa beserta perangkat desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya. Menurut Siagian (2003), administrasi pembangunan merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang diarahkan untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Pasal 2 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan asas rekognisi, subsidiaritas, kebersamaan, kegotongroyongan, musyawarah, demokrasi, partisipasi, pemerataan, keadilan, dan keberlanjutan. Selanjutnya, Pasal 4 menjelaskan bahwa pengaturan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya, termasuk dalam memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dalam kajian ilmu pemerintahan, pelaksanaan peran pemerintah pada dasarnya diwujudkan melalui fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah. Muhadam Labolo (2017) menjelaskan pemikiran Ryaas Rasyid bahwa dalam pemerintahan modern fungsi pemerintahan terdiri atas pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowerment), dan pengaturan (regulation). Keempat fungsi tersebut menggambarkan bentuk pelaksanaan pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian, penelitian mengenai peran Pemerintah Desa dapat dianalisis melalui pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian ini tidak menganalisis seluruh fungsi pemerintahan sebagaimana dikemukakan oleh Ryaas Rasyid, tetapi memfokuskan analisis pada fungsi-fungsi yang paling relevan dengan kewenangan pemerintah desa dalam mendukung kestabilan jaringan listrik dari aspek nonteknis. Fokus tersebut meliputi fasilitasi, yaitu mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan gangguan listrik kepada pihak yang berwenang; koordinasi, yaitu menghubungkan masyarakat dengan PLN serta mendorong kerja sama dalam menjaga lingkungan sekitar jaringan listrik; dan pembinaan, yaitu memberikan informasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan listrik yang aman dan pentingnya menjaga lingkungan di sekitar jaringan listrik. Ketiga fokus tersebut dipilih sebagai bentuk operasional pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam menganalisis peran Pemerintah Desa Pulau Manak.

Selanjutnya, Dunn (2003) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Kebijakan publik tidak selalu diwujudkan dalam bentuk program teknis, tetapi juga melalui tindakan pemerintah dalam memfasilitasi komunikasi, menjembatani aspirasi masyarakat, serta menghubungkan masyarakat dengan instansi yang berwenang. Sejalan dengan itu, Sinambela (2010) menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, peran Pemerintah Desa Pulau Manak tidak dipahami sebagai pelaksana

pemeliharaan teknis jaringan listrik, melainkan sebagai penyelenggara pemerintahan yang menjalankan fungsi pelayanan melalui fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan kepada masyarakat.

Peran Pemerintah Desa dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai pelaksanaan kewenangan teknis dalam pemeliharaan maupun perbaikan jaringan listrik, melainkan sebagai pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Sebagaimana dijelaskan oleh Ryaas Rasyid (dalam Labolo, 2017), fungsi pemerintahan merupakan bentuk pelaksanaan tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan. Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan fungsi pemerintahan tersebut dianalisis melalui aspek fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan yang disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Desa dalam mendukung kestabilan jaringan listrik dari aspek nonteknis. Hardiansyah (2011) menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik tercermin dari kemampuan penyelenggara pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat, cepat, dan memuaskan. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh pemerintah desa diharapkan mampu memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat ketika terjadi gangguan jaringan listrik.

Hubungan antara Pemerintah Desa dan PLN dalam penyelenggaraan pelayanan ketenagalistrikan bersifat koordinatif dan komunikatif, bukan hubungan kewenangan teknis. Pemerintah Desa berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pihak penyelenggara layanan listrik sehingga informasi mengenai gangguan listrik yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat segera disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan data awal Pemerintah Desa Pulau Manak Tahun 2024, terdapat sejumlah laporan masyarakat mengenai gangguan jaringan listrik yang disampaikan kepada pemerintah desa. Sebagian laporan berhasil diteruskan kepada pihak PLN, sedangkan sebagian lainnya mengalami keterlambatan akibat belum tersedianya mekanisme pencatatan dan pengelolaan laporan secara administratif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi lebih berkaitan dengan aspek pelayanan publik, komunikasi, dan koordinasi daripada persoalan teknis jaringan listrik itu sendiri. Selain itu, berdasarkan hasil penelusuran terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Pulau Manak, tidak ditemukan program maupun kegiatan yang secara khusus mengatur pemeliharaan jaringan listrik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan jaringan listrik bukan merupakan kewenangan Pemerintah Desa, melainkan menjadi tanggung jawab pihak PLN sebagai penyelenggara layanan ketenagalistrikan. Di sisi lain, kehidupan masyarakat Desa Pulau Manak masih ditandai dengan kuatnya budaya gotong royong sebagai bentuk partisipasi sosial dalam menjaga lingkungan. Kegiatan tersebut umumnya dilakukan secara swadaya untuk menjaga kebersihan

lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, serta menciptakan ketertiban di lingkungan desa. Meskipun tidak secara khusus ditujukan untuk pemeliharaan jaringan listrik, praktik gotong royong tersebut dapat menjadi potensi yang mendukung upaya pemerintah desa dalam mengoordinasikan partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkungan di sekitar jaringan listrik. Keban (2014) menjelaskan bahwa administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan pelayanan publik. Sejalan dengan itu, Eko (2014) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat melalui kegiatan gotong royong merupakan salah satu modal sosial yang dapat memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Pulau Manak dalam mendorong kestabilan jaringan listrik dari aspek nonteknis melalui pelaksanaan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Analisis penelitian mengacu pada konsep fungsi pemerintahan menurut Ryaas Rasyid sebagaimana dijelaskan oleh Muhadam Labolo (2017), yang kemudian dioperasionalkan ke dalam tiga fokus analisis, yaitu fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan. Ketiga fokus tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Desa memfasilitasi penyampaian laporan gangguan listrik, mengoordinasikan komunikasi antara masyarakat dengan pihak PLN, serta membina masyarakat dalam penggunaan listrik yang aman dan pemeliharaan lingkungan di sekitar

jaringan listrik. Dengan demikian, penelitian ini tidak menempatkan Pemerintah Desa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan teknis jaringan listrik, melainkan sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang menjalankan fungsi pelayanan publik melalui peran administratif, koordinatif, dan pembinaan dalam mendukung kestabilan jaringan listrik di Desa Pulau Manak.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi fasilitasi Pemerintah Desa dalam menjembatani penyampaian laporan masyarakat kepada pihak PLN terkait gangguan jaringan listrik belum berjalan secara optimal karena belum didukung mekanisme pencatatan dan pengelolaan laporan yang terstruktur.
2. Pelaksanaan fungsi koordinasi Pemerintah Desa dalam mengelola partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkungan di sekitar jaringan listrik belum berjalan secara optimal sehingga kegiatan pemeliharaan lingkungan masih bersifat situasional dan belum terencana.

3. Pelaksanaan fungsi pembinaan Pemerintah Desa kepada masyarakat mengenai penggunaan listrik yang aman dan tertib belum dilaksanakan secara maksimal.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka fokus penelitian ini adalah mengkaji peran Pemerintah Desa Pulau Manak dalam mendorong kestabilan jaringan listrik bagi masyarakat di Desa Pulau Manak, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu.

Fokus penelitian ini diarahkan pada peran Pemerintah Desa dalam aspek nonteknis penyelenggaraan pemerintahan desa yang dianalisis melalui pelaksanaan fungsi pemerintahan sebagaimana dikemukakan oleh Ryaas Rasyid dalam Labolo (2017). Pelaksanaan fungsi tersebut difokuskan pada tiga aspek, yaitu fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan. Aspek fasilitasi meliputi penyampaian laporan masyarakat terkait gangguan jaringan listrik kepada pihak PLN, aspek koordinasi meliputi komunikasi dan kerja sama dengan pihak yang berkaitan dengan pelayanan kelistrikan serta pengelolaan partisipasi masyarakat, sedangkan aspek pembinaan meliputi pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan listrik yang aman serta pentingnya menjaga lingkungan di sekitar jaringan listrik.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran Pemerintah Desa Pulau Manak dalam mendorong kestabilan jaringan listrik bagi masyarakat di Desa Pulau Manak, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Desa Pulau Manak dalam mendorong kestabilan jaringan listrik bagi masyarakat di Desa Pulau Manak, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu yang dianalisis melalui pelaksanaan fungsi fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan menurut Ryaas Rasyid dalam Labolo (2017).

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya mengenai peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah perdesaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi akademik mengenai peran pemerintah desa dalam mendukung pelayanan publik yang secara teknis berada di luar

kewenangannya melalui pelaksanaan fungsi fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara pemerintah desa, masyarakat, dan instansi penyedia layanan publik, khususnya dalam mendukung pelayanan kelistrikan di wilayah perdesaan dari perspektif ilmu pemerintahan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Pemerintah Desa Pulau Manak sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan peran pemerintah desa dalam mendukung kestabilan jaringan listrik melalui pelaksanaan fungsi fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan masyarakat. Meskipun pemeliharaan jaringan listrik merupakan kewenangan teknis PLN, pemerintah desa tetap memiliki peran dalam memfasilitasi penyampaian laporan masyarakat, mengoordinasikan komunikasi dengan instansi terkait, serta memberikan pembinaan mengenai penggunaan listrik yang aman dan tertib.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam memperkuat mekanisme pelaporan gangguan listrik, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan gotong royong untuk menjaga lingkungan di sekitar jaringan listrik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa tanpa melampaui kewenangan teknis

pemeliharaan jaringan listrik yang menjadi tanggung jawab instansi penyedia layanan listrik.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik di tingkat lokal.